# BAB 1
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor yang beralamat di Jalan Raya Jatinangor KM 20 Sumedang adalah salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, yang bertujuan mempersiapkan kader pemerintah, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Pada tahun 2014 praja yang ada di IPDN Jatinangor berjumlah 4897 praja yang terbagi menjadi 4 tingkatan yaitu Muda Praja yang berjumlah 2017 praja, Madya Praja yang berjumlah 846 praja, Nindya Praja yang berjumlah 706 praja, dan Wasana praja yang berjumlah 1307 praja. Semua praja ini ditampung di IPDN dan ditempatkan di wisma yang berjumlah 72 wisma yang dibagi berdasarkan jenis kelamin dan tingkat praja tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, semua kegiatan praja setiap hari harus dibimbing dan diawasi oleh pengasuh agar pelaksanaan peraturan tata tertib dan penegakan disiplin praja bisa dijalankan sesuai yang diinginkan yang kemudian akan dijadikan bahan evaluasi kedisiplinan praja oleh Kepala Bagian Pengasuhan di Bagian Pengasuhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pengasuhan IPDN Jatinangor, saat ini Kepala Bagian Pengasuhan memiliki keterbatasan dalam mengetahui tingkat kedisiplinan praja yang terkait dengan pemberian atau penetapan nilai kedisiplinan praja dari setiap parameter kedisplinannya seperti kehadiran kegiatan praja (pelaksanaan aerobik, pelaksanaan apel pagi, pelaksanaan makan pagi, pelaksanaan makan siang, pelaksanaan makan malam, pelaksanaan wajib belajar dan pelaksanaan apel malam) dan ketertiban wisma. Ini disebabkan banyak praja yang bermasalah tetapi sering kali terlewatkan untuk di berikan tindakan kedisiplinan, karena data monitoring kedisiplinan praja tidak tercatat secara keseluruhan dengan baik. Akibatnya Kepala Bagian Pengasuhan

kesulitan untuk menentukan jenis sanksi sesuai tingkat kedisiplinan masing-masing.

Selama ini proses *monitoring* dan evaluasi kedisiplinan praja dilihat dari rekap laporan harian yang dibuat secara manual dari data laporan kehadiran kegiatan praja. Laporan kehadiran kegiatan praja dibuat oleh pengasuh yang diserahkan kepada kepala satuan dan kepala siklus kehidupan untuk diperiksa dan disahkan, kemudian dibuat rekap laporan harian oleh kepala siklus kehidupan untuk diserahkan kepada kepala bagian pengasuhan untuk dijadiakan bahan *monitoring* dan evaluasi kedisiplinan praja. Pada proses ini sering terjadi keterlambatan dalam pengumpulan laporan kehadiran kegiatan oleh semua pengasuh yang mengakibatkan terlambatnya proses pembuatan laporan harian yang seharusnya dijadikan bahan untuk menentukan tindakan selanjutnya terhadap kedisiplinan praja, karena letak kantor pengasuh, kepala satuan pengasuhan, kepala siklus kehidupan, dan kepala bagian pengasuhan yang berjauhan sehingga sulit dalam mendapatkan informasi mengenai kedisiplinan praja.

Berdasarkan masalah yang dikemukakan, maka dibutuhkan suatu pembangunan sistem *monitoring* dan evaluasi kedisiplinan praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor yang terhubung secara *online* agar memudahkan akses terhadap sistem.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang terjadi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor adalah bagaimana membangun sistem *monitoring* dan evaluasi kedisiplinan praja di bagian pengasuhan.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengimplementasikan *Sistem Monitoring dan Evaluasi Kedisiplinan Praja di Bagian Pengasuhan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.*

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mempermudah Kepala Bagian Pengasuhan untuk mengetahui tingkat kedisiplinan praja dari setiap parameternya dengan membuat sistem *monitoring* dan evaluasi yang bisa memberikan informasi terhadap tingkat kedisiplinan praja.
2. Mempermudah Kepala Bagian Pengasuhan dalam mengetahui data terkait kehadiran kegiatan praja agar hasilnya dapat langsung dievaluasi untuk menentukan tindakan selanjutnya yaitu penentuan jenis sanksi untuk ketidakhadiran praja.
3. Mempermudah Kepala Bagian Pengasuhan dalam mengetahui data terkait kebersihan wisma untuk menentukan tindakan selanjutnya yaitu penentuan sanksi dan penghargaan untuk tingkat kebersihan wisma di masing-masing wisma.
4. Mempermudah kepala satuan untuk melakukan persetujuan dan mendapatkan informasi mengenai laporan kehadiran kegiatan praja.
5. Mempermudah kepala bagian siklus kehidupan untuk melakukan persetujuan dan mendapatkan informasi mengenai laporan harian kegiatan yang didapat dari data laporan kehadiran kegiatan praja.
6. Mempermudah pengasuh dalam pembuatan laporan kehadiran kegiatan praja dan laporan kebersihan wisma.

## 1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah ini dimaksudkan agar pembahasan dan penyusunan laporan dapat dilakukan secara terarah dan tidak menyimpang serta sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Acuan yang dijadikan dalam sistem *monitoring* dan evaluasi kedisiplinan praja ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Peraturan Disiplin Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada Lampiran D.

2. Parameter *monitoring* dan evaluasi kedisiplinan praja adalah kehadiran kegiatan praja (pelaksanaan aerobik, pelaksanaan apel pagi, pelaksanaan makan pagi, pelaksanaan makan siang, pelaksanaan makan malam, pelaksanaan wajib belajar dan pelaksanaan apel malam) dan ketertiban wisma.
3. Data yang digunakan berhubungan dengan monitoring dan evaluasi yaitu data praja, data *User*, data wisma, data tahun akademik, data kehadiran kegiatan, dan data kebersihan wisma.
4. Sistem *monitoring* dan evaluasi ini merupakan aplikasi berbasis web.
5. Keluaran sistem *monitoring* dan evaluasi ini, yaitu:
   a. Informasi *Monitoring* praja berupa tabel dan grafik presentase wisma yang mempunyai jumlah praja yang tidak disiplin dengan jumlah keterangan kehadiran tanpa keterangan lebih dari 3 (tiga) orang.
   b. Informasi evaluasi kedisiplanan praja yang berupa pemberitahuan tindakan yang harus diambil selanjutnya.
   c. Informasi penilaian kebersihan wisma berupa tabel dan grafik presentase kebersihan wisma yang terbersih.
6. Pemodelan sistem yang digunakan adalah metodologi berorientasi objek menggunakan *Unifield Modeling Language* (UML).
7. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP (*PHP Hypertext Processor)* dengan menggunakan framework Codeigniter, DBMS MySQL.

## 1.5 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu proses yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang logis, dimana memerlukan data-data untuk mendukung terlaksananya suatu penelitian. Metode penelitian ini memiliki dua tahapan, yaitu tahap pengumpulan data dan tahap pengumpulan perangkat lunak**.**

### 1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Tahapan pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Studi Literatur

   Studi ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai literatur-literatur dari perpustakaan yang bersumber dari buku-buku, teks dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan topik penelitian.

b. Studi Lapangan

   Studi ini dilakukan dengan cara mengunjungi tempat yang akan diteliti dan pengumpulan data dilakukan secara langsung. Hal ini meliputi:

   1. Wawancara

      Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data dengan cara sesi tanya jawab secara langsung dengan pihak instansi terkait dengan penelitian.

   2. Observasi

      Observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dengan pihak instansi terkait dengan penelitian.

### 1.5.2 Metode Pembangunan Perangkat Lunak

Metode pembangunan perangkat lunak yang digunakan menggunakan model *waterfall.* Proses-proses yang terdapat dalam model *waterfall* menurut Roger S. Pressman[1], diantaranya:

a. Komunikasi

   Suatu proses aktivitas kerangka kerja yang melibatkan komunikasi dan kolaborasi dengan pengguna dan *stakeholder* lainnya yang meliputi persyaratan pengumpulan dan kegiatan terkait untuk mendapatkan spesifikasi kebutuhan pengguna.

b. Perencanaan

Setelah proses komunikasi telah berjalan maka pada proses selanjutnya proses perencanaan mengenai pembangunan sistem. Proses ini dimulai dari proses estimasi waktu yang akan digunakan, merencanakan aktivitas kerangka kerja yang menetapkan suatu prakiraan-prakiraan untuk rekayasa perangkat lunak yang menggambarkan tugas-tugas yang akan dilakukan, resiko yang mungkin terjadi, pekerjaan produk yang harus dihasilkan, dan jadwal kerja.

c. Pemodelan

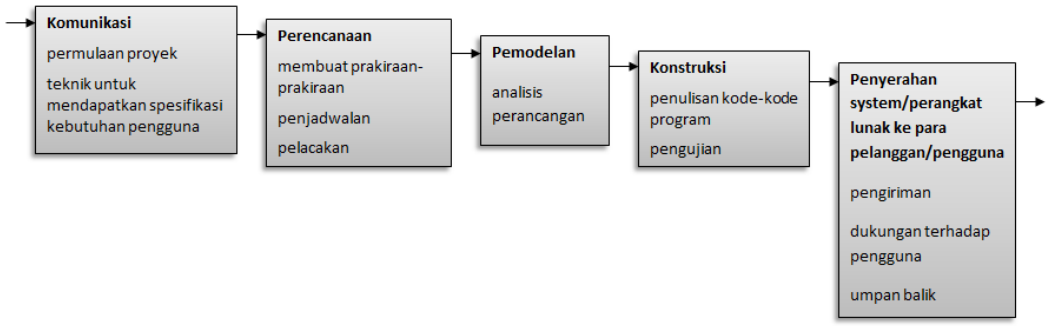
Pada proses ini, kebutuhan sistem diubah menjadi representasi ke dalam bentuk "*blueprint*" software sebelum coding dimulai dengan menggunakan analisis perancangan *Unified Modeling Language (UML).* Desain ini dibuat untuk mengetahui gambaran proses kerja aplikasi yang kita buat sehingga dapat dijadikan acuan saat proses implementasi sistem ke dalam bentuk *code*.

d. Konstruksi

Proses ini menggabungkan kegiatan penulisan kode program (*coding)* dan pengujian (*testing*) yang diperlukan untuk mengungkapkan kesalahan dalam *code*. Penulisan kode program adalah proses yang dilakukan agar mesin dalam hal ini komputer dapat menjalankan aplikasi yang telah dibangun. Dalam aplikasi ini code yang digunakan adalah PHP dengan menggunakan *framework* CodeIgniter. Setelah proses penulisan kode program selesai, dilakukan pengujian aplikasi yang sudah dibangun. Semua fungsi-fungsi *software* harus diujicobakan, agar *software* bebas dari kesalahan, dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya.

e. Penyerahan Sistem atau Penyebaran

Pada proses ini perangkat lunak diberikan kepada perusahaan dimana perusahaan yang akan mengevaluasi dan memberikan umpan balik berdasarkan hasil evaluasi.




**Gambar 1. 1 Waterfall Model [1]**

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

**BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab yang membahas latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

**BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang profil umum Bagian Pengasuhan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, logo Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, struktur organisasi Bagian Pengasuhan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, tugas dan wewenang Bagian Pengasuhan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, landasan teori yang berisi teori-teori yang melandasi dari pembangunan sistem *monitoring* dan evaluasi kedisiplinan praja di Bagian Pengasuhan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor**.**

**BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN**

Bab ini berisi tentang analisis sistem, analisis masalah, analisis sistem yang sedang berjalan di Bagian Pengasuhan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, analisis *monitoring* dan evaluasi, analisis kebutuhan non-fungsional, analisis fungsional, dan terdapat perancangan antarmuka, jaringan

semantik, dan perancangan method untuk aplikasi yang dibangun sesuai dengan hasil analisis yang telah dibuat.

**BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM**

Bab ini berisi hasil implementasi dari hasil analisis dan perancangan sistem yang telah dibuat disertai juga hasil pengujian sistem yang dilakukan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor sehingga diketahui apakah sistem yang dibangun sudah memenuhi syarat sebagai aplikasi yang *User-friendly* dan metode pengujian dalam sistem *monitoring* dan evaluasi kedisiplinan praja ini menggunakan pengujian *black box*.

**BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari uraian proses pembangunan dan saran – saran tentang aplikasi untuk penulisan tugas akhir.